

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan atau iuran yang wajib disetorkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada pemerintah sebagai pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh dari pajak akan digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan sebagai pembiayaan pembangunan negara. Terdapat tiga macam pendapatan utama negara Indonesia yaitu perpajakan, bukan pajak, dan hibah. Penerimaan perpajakan Indonesia adalah sebesar 1.865,7 T sedangkan Penerimaan Negara bukan Pajak sebesar 367,0 T dan penerimaan hibah sebesar 0,5 T (Kementerian Keuangan, 2020). Berdasarkan data tersebut, pendapatan terbesar diperoleh dari penerimaan perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (UU KUP No. 16, 2009) Rochmat Soemitro berpendapat tentang pengertian pajak yang dikutip oleh Mardiasmo (2019) Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara tanpa mandapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan, bersifat memaksa bagi warga negara atau wajib pajak digunakan untuk pengeluaran umum negara dan pemungut tidak mendapatkan imbalan kembali.

Jenis pajak dibagi menjadi tiga yaitu golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri atau tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan, contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut atas penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. PPN dikenakan saat perusahaan melakukan pembelian atau penjualan Barang Kena Pajak (BKP) Atau Jasa Kena Pajak (JKP) atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian atau penjualan dikenakan tarif 10% dari harga jual sebelum pajak. PPN dibagi menjadi dua jenis yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya telah dibayarkan oleh PKP atas perolehan BKP atau JKP. Sedangkan Pajak Keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP ketika penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP.

Rekonsiliasi merupakan proses mencocokkan dua data yang berbeda. Rekonsiliasi dapat dilakukan jika sebuah transaksi terdapat lebih dari satu pihak yang mencatat. Rekonsiliasi PPN harus mencocokkan catatan transaksi perusahaan dengan informasi mengenai pajak yang telah dilaporkan. Setelah mencocokkan saldo dan terdapat perbedaan atau selisih perlu adanya penyelesaian. Proses rekonsiliasi PPN dilakukan agar memastikan seluruh objek pajak, baik objek PPh badan maupun PPN, sudah dihitung, dibayar serta disetorkan sesuai dengan syarat perpajakan yang berlaku atas penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Tugas yang diberikan senior auditor saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di KAP BTFD adalah merekonsiliasi PPN Masukan pada PT WFH yang merupakan klien dari KAP selama lebih dari tiga tahun. PT WFH merupakan sebuah perusahaan kontraktor, ketika proses pemenuhan kebutuhan usaha PT WFH melakukan pembelian BKP dan memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuan dari tugas yang diberikan adalah menganalisis faktor penyebab perbedaan yang terjadi antara perhitungan perusahaan dengan SPT yang telah dilaporkan melalui PPN Keluaran dan PPN Masukan. Setelah mengetahui jumlah PPN yang seharusnya disetorkan berbeda dengan jumlah yang disetorkan PT WFH mengalami dampak. Dampak dari perbedaan tersebut

mengakibatkan SPT Masa PPN PT WFH berstatus kurang bayar dimana perusahaan perlu melakukan pembetulan dan timbulnya hutang PPN. Pembetulan dilakukan dengan cara menyetorkan kembali sejumlah kurang bayar yang dialami dan perlu membuat jurnal koreksi. Atas penjelasan dalam latar belakang ini diangkatlah topik rekonsiliasi PPN Masukan dan Dampaknya Pada PT WFH.

1.2 Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan bertempat di Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans & Daniel (BTFD) yang berlokasi di Surabaya. Jenis pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan lapangan yang bertugas untuk merekonsiliasi PPN klien atas PPN Masukan dan Keluaran. Rekonsiliasi yang dilakukan antara rekap lampiran pajak masukan dan keluaran, rekap pembelian dengan SPT yang telah dilaporkan, dan membandingkan antara jumlah PPN Keluaran dan PPN Masukan.

1.3 Tujuan Laporan

Tujuan atas dibuatnya laporan ini, sebagai berikut:

1. Menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan pada dunia kerja yang sesungguhnya baik teori maupun praktik. Terutama tentang rekonsiliasi.
2. Meningkatkan pengalaman dan keterampilan dalam menganalisis antara dua data yang berbeda saat merekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan SPT yang telah dilaporkan.
3. Mengetahui detail transaksi PT WFH dan faktor yang menyebabkan perbedaan.

1.4 Manfaat Laporan

1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa

Mempraktekkan langsung proses rekonsiliasi PPN, mengetahui solusi jika terjadi PPN Kurang Bayar dan sebagai sarana untuk menambah keterampilan dalam dunia pekerjaan terutama dibidang rekonsiliasi PPN.

1.4.2 Manfaat bagi Kantor Akuntan Publik

Membantu senior Auditor untuk merekonsiliasi PPN-MK pada PT WFH untuk menganalisis perbedaan, dan membantu membuat jurnal koreksinya.

1.4.3 Manfaat Akademis

Memberikan pengetahuan tambahan secara riil dalam bidang rekonsiliasi terutama rekonsiliasi PPN masukan dengan metode yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

- a. Bab I, berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat laporan dan sistematika penulisan atas pemilihan atau pembuatan laporan tugas akhir.
- b. Bab II, berisi landasan teori sebagai acuan penerapan ilmu pengetahuan pada pembuatan laporan tugas akhir.
- c. Bab III, berisi gambaran umum tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan.
- d. Bab IV, berisi pembahasan atas salah satu kegiatan dalam praktik kerja lapangan dan kemudian diangkat menjadi topik laporan tugas akhir.
- e. Bab V, berisi kesimpulan laporan tugas akhir dan saran perbaikan bagi klien tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan.